



## Kajian sosiologis tentang kemiskinan petani dan peran ganda demi rumah tangga

Purnamasari<sup>1</sup>, Batrisyia Balqis<sup>2</sup>, Muhamad Ridwan Pohan<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Universitas Maritim Raja Ali Haji

<sup>1</sup>[nanapurnama69@gmail.com](mailto:nanapurnama69@gmail.com), <sup>2</sup>[batrisyiaabalqis@gmail.com](mailto:batrisyiaabalqis@gmail.com), <sup>3</sup>[rpohan30@gmail.com](mailto:rpohan30@gmail.com)

### Info Artikel :

Diterima :

20 Januari 2023

Disetujui :

15 Januari 2023

Dipublikasikan :

25 Januari 2023

### ABSTRAK

Tinjauan atas kenyataan kemiskinan pada sektor perkebunan memasuki dimensi baru, semenjak adanya krisis ekonomi yg ikut sedikit poly mensugesti sektor ini. Wilayah kajian baru tersebut merupakan pola penyesuaian nafkah petani perkebunan skala kecil (plasma) pada menyiasati krisis ekonomi. Dengan menelaah 2 masalah pada Provinsi kepulauan Riau, diperoleh citra taktik adaptasi nafkah yg menarik. Sudi ini menyimpulkan bahwa taktik nafkah ganda sebagai konduite atau tindakan ekonomi yg menonjol dipakai sang petani perkebunan miskin pada ke 2 daerah penelitian. Strategi adaptasi nafkah yang diimplementasikan umumnya permanen di ubah suaikan pada konteks sosio-budayalokal.

**Kata Kunci:** taktik adaptasi nafkah, kemiskinan, perkebunan

### ABSTRACT

*An overview of the reality of poverty in the plantation sector has entered a new dimension, since the economic crisis has affected this sector quite a bit. The new study area is a pattern of adjusting the livelihoods of small-scale plantation farmers (plasma) in dealing with the economic crisis. By examining two problems in Riau Province, an interesting image of livelihood adaptation strategies is obtained. This study concludes that the tactic of double livelihood as a conduit or a prominent economic measure is used by poor plantation farmers in the two research areas. The livelihood adaptation strategies implemented are generally permanently adapted to the local socio-cultural context.*

**Keywords:** livelihood adaptation tactics, poverty, plantations



©2022 Penulis. Diterbitkan oleh Arka Institute. Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi Creative Commons Attribution NonCommercial 4.0 International License. (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>)

## PENDAHULUAN

Kemiskinan Petani dan Rumah Tangga Pedesaan Subsektor perkebunan yang didominasi oleh perkebunan rakyat dengan luas sekitar 80 persen, telah menunjukkan ketahanannya dalam menghadapi krisis ekonomi Indonesia. kesejahteraan perkebunan rakyat di awal krisis ekonomi. Fenomena ini mengajarkan kepada kita bahwa perkebunan, khususnya perkebunan rakyat, berpotensi menjadi salah satu industri terpenting tidak hanya pada masa kemakmuran ekonomi tetapi juga pada masa krisis. Menurut Dalam sejumlah penelitian, perkebunan rakyat memainkan peran penting dalam mengentaskan kemiskinan, meningkatkan distribusi pendapatan, dan memacu pertumbuhan. Upaya untuk menjaga kontribusi perkebunan rakyat terhadap pertumbuhan dan distribusi pendapatan akan menghadapi sejumlah tantangan di masa depan. Selama tiga tahun terakhir, harga barang-barang primer perkebunan umumnya turun. Di sisi lain h dan, biaya input terus meningkat, mengurangi keuntungan bisnis perkebunan. Masalah mendasar lainnya yang mempengaruhi perkebunan rakyat adalah produktivitas yang relatif rendah.

Mayoritas petani pedesaan di Provinsi Riau adalah pekebun karet rakyat, pencari hasil hutan, dan petani. Perubahan kelembagaan terjadi akibat tumbuhnya tanaman ekspor seperti kopi, kelapa sawit, dan kelapa di (kampung), yang telah mengubah pengelolaan sumber daya pertanian. Mengutip Ahmad, Muchtar, dkk. (2002), kelembagaan lama telah berubah, dan kelembagaan baru tidak berjalan dengan baik, mengakibatkan kemiskinan dan usaha pertanian yang produktivitasnya sulit tumbuh. Meskipun krisis keuangan Indonesia tahun 1998, yang diikuti oleh krisis ekonomi dan politik (kepercayaan), telah pulih, dampaknya tetap relevan untuk dibahas. Masyarakat di daerah perkotaan dan pedesaan telah melihat peningkatan tajam dalam jumlah orang yang hidup di bawah kemiskinan. sebagai akibat dari dampak ekonomi krisis, yang meliputi ledakan tingkat pengangguran, penurunan

daya beli mereka untuk memenuhi kebutuhan hidup—seperti makanan, pakaian, perumahan, pendidikan, dan perawatan kesehatan—dan peningkatan pada jumlah penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan. Disintegrasi sosial, yang dicontohkan dengan meningkatnya ketimpangan sosial antara si kaya dan si miskin serta meningkatnya kriminalitas, merupakan dampak sosial dari krisis yang diakibatkan oleh krisis moral dan budaya bangsa. nilai-nilai luhur. Sementara itu, dampak ekologis dari krisis tersebut adalah pengabaian petani terhadap pengelolaan sumber daya alam (lahan) di areal perkebunan rakyat. Hal ini karena adanya interaksi dengan “kekuatan supradesa, yang beroperasi atas dasar kekuatan pasar. Sebagian petani dan pedagang kelas atas memperoleh keuntungan dari hal ini, sementara sebagian besar lainnya, terutama petani kecil dan buruh tani, kehilangan mata pencaharian. Tujuan dari artikel ini adalah untuk mengetahui tanda-tanda kemiskinan yang dialami petani kelapa di Indragiri Hilir dan petani kelapa sawit di Kabupaten Indragiri Hilir. Kampar mengalami krisis ekonomi sebagai akibat dari tekanan kelembagaan intervensi pasar yang telah mengubah lembaga ekonomi lokal (patronase dan KUD), serta bagaimana rumah tangga petani dapat menerapkan strategi penghidupan ganda. berkelanjutan. Dari pendekatan strategi pendapatan rumah tangga ganda, perlu untuk menyelidiki bagaimana menyelesaikan masalah ekonomi, sosial, dan lingkungan yang dihadapi petani perkebunan rakyat, serta penyebab yang mendasari masalah tersebut (dari pendekatan risiko dan dimensi bunga), dalam rangka berbagai upaya mitigasi dampak krisis ekonomi. Interaksi petani untuk mengembangkan a strategi penghidupan ganda untuk rumah tangga pedesaan berpedoman pada dimensi kepentingan.

## METODE PENELITIAN

Dalam artikel ini, sejumlah konsep digunakan, yang memerlukan pemahaman definisi. Idenya adalah:

Kemiskinan: adalah kondisi yang tidak hanya mencakup tingkat pendapatan rendah tetapi juga (a) kurangnya akses ke peluang .Distribusi aset sosial, manusia, dan fisik, serta peluang bisnis dan pekerjaan, terkait erat dengan pendapatan rendah; (b) Rendahnya keterampilan (dalam hal kesehatan dan pendidikan); c) Rendahnya tingkat keamanan nasional, lokal, dan rumah tangga (individu)—jaminan terhadap risiko dan tekanan ekonomi; d) Pemberdayaan (kapasitas masyarakat miskin untuk mengakses dan mempengaruhi institusi dan proses sosial yang menentukan alokasi sumber daya) (Quibria MG, 1996) Institusi ekonomi lokal (patronage) adalah institusi (institusi sosial) dalam hal perkebunan kelapa rakyat di wilayah Indragiri Hilir (inhil). adalah bagi para petani kelapa untuk mempersiapkan kebutuhan mereka dalam bertani kelapa agar mendapatkan harga kopra terbaik di pasar. Komunitas pertama petani kelapa adalah yang satu ini. Selain petani, pemilik modal dan pedagang kopra (tauke) adalah pemain utama dalam proses ini.

Sebaliknya, dalam kasus perkebunan kelapa sawit di wilayah Kampar, lembaga sosial yang dikenal sebagai lembaga ekonomi lokal (KUD) mengatur kemudahan petani kelapa sawit untuk mempersiapkan kebutuhan mereka dalam usahatani kelapa sawit untuk mengamankan penjualan setinggi mungkin. harga tandan buah segar kelapa sawit. Komunitas petani kelapa sawit telah menciptakan dan memelihara lembaga-lembaga ini. Selain petani (anggota KUD), pemain utama dalam proses ini adalah pabrik kelapa sawit dan pemasar produk kelapa sawit.

“proses di mana rumah tangga membangun berbagai kegiatan dan kemampuan dukungan sosial untuk bertahan hidup dan meningkatkan standar hidup mereka” adalah definisi dari pola mata pencaharian ganda di daerah pedesaan. Menurut Scoones (1998), penduduk pedesaan menggunakan tiga metode berbeda mencari nafkah: 1) intensifikasi atau perluasan pertanian; 2) diversifikasi mata pencaharian; dan 3) migrasi sukarela, disengaja, atau tidak sukarela.

Partisipasi individu dalam proses hubungan sosial yang berkelanjutan menghasilkan tindakan ekonomi. Aktivitas ekonomi selalu berakar pada jaringan hubungan interpersonal antar aktor (kontribusi Granovetter), didorong oleh kepentingan sebagai kekuatan fundamental yang didefinisikan secara sosial (kontribusi Swedberg), dan selalu melibatkan makna dan perhatian pada kekuasaan (kontribusi Weber). Mengacu pada Swedberg (2003), beberapa usulan dapat dibuat: 1) Minat mendorong aktivitas ekonomi, 2) Minat adalah fenomena sosial yang didefinisikan secara sosial, dan 3) Minat diwujudkan melalui hubungan sosial.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Kerangka Pemikiran Perilaku ekonomi petani yang terpinggirkan dari penataan komoditas tanaman komersial seringkali menjadi penyebab ketidakmampuan petani untuk berinvestasi: 1) Pertanian keluarga masih mendominasi pertanian; (2) Karena berlangsung dalam konteks kekurangan modal, lahan, dan tenaga kerja, maka hasil yang dicapai minimal; 3) Hanya tenaga kerja yang menjadi faktor produksi utama yang dimiliki. Seperti kegagalan atau krisis yang mengganggu jaminan subsistensi bagi petani yang hidup mendekati batas, mereka memprioritaskan apa yang mereka anggap aman dan dapat diandalkan daripada manfaat jangka panjang (Scott, 1989).

Lembaga ekonomi lokal (patronage) yang mengatur hubungan antara petani dengan pemilik modal dan pedagang (tauke) mengembangkan tatanan berdasarkan prinsip pertukaran (reciprocity), resiprositas, dan nilai subsisten dalam kasus perkebunan kelapa rakyat. dapat membagi risikonya di antara tauke, yang berfungsi sebagai asuransi sosial petani. Sementara itu, lembaga ekonomi yang ada, KUD dan perusahaan inti, mengatur hubungan antara petani, pemilik modal, dan pemasar di perkebunan kelapa sawit untuk menciptakan ketertiban berbasis pada prinsip ekonomi (pasar). Karena itu, sulit bagi petani untuk berbagi risiko dengan institusi.

Dalam kedua kasus tersebut, terlihat bahwa ketika tekanan intervensi pasar meningkat, kelembagaan ekonomi lokal berubah, yang mengakibatkan penurunan kesejahteraan ekonomi petani dan peningkatan ketimpangan antar lapisan. Intervensi pasar kelembagaan yang menciptakan sistem berdasarkan prinsip pertukaran pasar (keuntungan saja). Menurut teori pertukaran sosial Burns et al. (1987), proses pertukaran semacam ini disebut sebagai pertukaran sosial yang berorientasi pada kepentingan diri sendiri (fokus aktor semata-mata pada kepentingan mereka sendiri). manfaat) dan untuk kepentingan orang lain (kerjasama). Sistem patronase yang mengakar, meskipun tidak ada kontrol pemerintah yang signifikan, telah mengkondisikan kegiatan ekonomi pemasaran kelapa sedemikian rupa sehingga petani semakin tidak mampu melakukannya. Sebagai lembaga intervensi pasar, pabrik kelapa sawit tidak bisa langsung mengintervensi pasar atau bahkan berkolaborasi dengan pemilik usaha. Memberdayakan.

Kondisi pengelolaan kebun yang semakin memburuk akibat ketidakberdayaan petani kelapa diperparah dengan fluktuasi harga kopra di tingkat petani yang terkait dengan berbagai faktor pengelolaan seperti penggunaan tenaga kerja, pengadaan modal, bahan baku, alat, pemasaran, dan pengembangan usaha. Akibatnya, petani telah mengembangkan strategi pendapatan rumah tangga untuk bertahan hidup dan meningkatkan taraf hidup mereka, yang telah menarik berbagai pemangku kepentingan.

Petani telah melawan (sikap dan perilaku acuh tak acuh) sebagai akibat dari pelanggaran bos atas cadangan subsisten mereka dan rasa keadilan yang terganggu. Hal ini menunjukkan bahwa kepentingan sosial (jaminan keamanan) memainkan peran penting ketika memilih strategi penghidupan rumah tangga untuk meningkatkan taraf hidup mereka. Selain itu, proses kolektif memainkan peran yang lebih besar dalam pengambilan keputusan daripada proses individu. Kapsul sosial sebagian besar bertanggung jawab untuk mendefinisikan lingkungan transaksional yang diatur pasar. Tidak ada transaksi yang sebanding di antara mereka; melainkan, mereka diatur oleh kepentingan kekuasaan (Etzioni, 1992; 1998 Swedberg).

Pendekatan Lapangan Temuan penelitian ini merupakan bagian dari Kajian Penelitian Produksi Perkebunan Rakyat dan Penanggulangan Kemiskinan tahun 2000, yang dilakukan bekerjasama dengan Bank Dunia oleh Puslitbang Perkebunan. Kecamatan Mandah, Indragiri Hilir kabupaten, dan perkebunan dipilih untuk perkebunan kelapa rakyat. Perkebunan Inti Rakyat-Transmigrasi (PIR-Trans) Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar adalah rumah bagi kelapa sawit rakyat. Berbagai metode digunakan untuk mengumpulkan data, antara lain: wawancara dengan pengurus kelompok dan pengurus organisasi, diskusi kelompok dengan anggota kelompok dan anggota organisasi, wawancara mendalam dengan rumah tangga petani sukses/miskin dan petani gagal/miskin, dan informan lain: pengusaha, penyuluh, pedagang, dan kepala desa baik formal maupun informal. Metode triangulasi, termasuk wawancara dan observasi terhadap berbagai subjek dan informan, digunakan untuk memverifikasi fyi validitas data.

## Pembahasan

Pengelolaan Perkebunan Rakyat dan Gejala Kemiskinan Menurunnya pengelolaan kebun rakyat disebabkan oleh faktor eksternal (kondisi pasar global, harga yang terus-menerus bergeser di luar kendali, kepentingan politik) bisnis pemerintah dan swasta, dan ketergantungan mereka pada pihak ketiga). Pada gilirannya, mereka mempengaruhi atau berinteraksi dengan berbagai faktor yang mempengaruhi bagaimana pengelolaan perkebunan rakyat dilakukan, termasuk: penggunaan tenaga kerja, pembelian modal, pembelian bahan dan alat, membeli teknologi dan informasi, serta memasarkan dan mengembangkan bisnis).

Situasi penurunan harga terutama menghalangi petani untuk mengoperasikan perkebunan kelapa di wilayah Inhil:a Mempekerjakan tenaga kerja upahan (sementara pekerja keluarga memiliki waktu terbatas karena tugas ganda: menjadi karyawan perusahaan, misalnya), (b) menaikkan modal untuk membayar hutang kepada pemiliknya—bahkan sampai “menutup buku”<sup>2</sup> terlebih dahulu—dan (c) memperoleh peralatan dan pupuk. Ketiga dan terakhir: Ketika harga kopra turun, istilah lokal untuk kebijakan penutupan ini buku digunakan oleh tauke untuk "membantu" petani kecil. Triknya adalah untuk sementara berutang. Faktor-faktor tersebut pada akhirnya menurunkan kuantitas dan kualitas produksi, (d) membuat petani lebih bergantung pada petani dan pabrik kelapa sawit untuk pemasaran, karena petani tidak memiliki kendali atas harga, dan (e) menyebabkan penurunan usaha karena penjualan hasil perkebunan kelapa.as serta karena terlantarnya lahan kebun (lihat lampiran 1). Buruknya atau memburuknya pengelolaan kebun kelapa rakyat pada akhirnya berdampak pada kesejahteraan ekonomi petani.<sup>3</sup> Petani kelapa di wilayah Indragiri Hilir menunjukkan gejala kemiskinan dan perilaku ekonomi petani marginal dalam penataan komoditas tanaman komersial. aset dan modal serta tatanan kelembagaan ekonomi lokal (patronage) merupakan akar penyebab kemiskinan petani, bukan krisis itu sendiri. kontrol modal antar lapisan. (2) Pada kasus kelapa sawit PIR-Trans di wilayah Kampar, dinamika pengelolaan PIR-Trans selama lima tahun terakhir lebih terlihat setelah konversi.<sup>4</sup> Kondisi pengelolaan perkebunan kelapa sawit pada umumnya cenderung membaik.

Anggapan yang dibuat adalah bahwa pengalaman pribadi seorang petani sangat menentukan keberhasilan usahatani. Kinerja ekonomi petani akan menjadi yang terbaik jika ia bertindak bebas dan sesuai dengan pengalaman bertaninya. Petani kecil biasanya tidak dapat bekerja karena ke birokrasi dan peraturan formal ketika mereka dipekerjakan oleh perusahaan inti kelapa sawit. Tampaknya penjelasan sosiologis lebih tepat, mengingat posisi petani meningkat setelah masa konversi, di mana petani kelapa tidak harus dibayar terlebih dahulu untuk waktu yang lama. Namun, kecuali utang sebelumnya telah dilunasi. , petani penanam tidak boleh lagi berhutang kepada tauke setelah buku ditutup.

Dia dulu bekerja sebagai buruh, tetapi sekarang dia memiliki perkebunan kelapa sawit. Dengan kata lain, dia sekarang adalah seorang manajer dan pasti akan berusaha untuk mengelola kebunnya dengan lebih baik.

Pengelolaan kebun juga sangat dipengaruhi oleh faktor eksternal. Perekonomian petani kelapa sawit PIR-Trans dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti pasar global dan fluktuasi harga pasokan. Harga kelapa sawit dan tandan buah segar meningkat selama krisis keuangan , namun harga tandan buah segar saat ini lebih rendah dibandingkan sebelum krisis.<sup>6</sup> Namun, tampaknya perubahan harga tandan buah segar tidak berdampak signifikan terhadap pola pengelolaan kebun rakyat. pengelolaannya dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain (1) penggunaan pupuk; (2) uang; (3) informasi dan teknologi; (4) Pemasaran terus mendapat dukungan yang signifikan dari inti melalui koperasi, dan dalam beberapa kasus<sup>7</sup>, tenaga kerja masih digunakan secara bersama-sama dengan anggota kelompok lainnya. Untuk mencapai rasa aman dalam usaha bersama, ini menunjukkan bahwa risiko harga pada pengelolaan perkebunan merupakan risiko bersama.

Dalam hal mengelola perkebunan rakyat, petani biasanya bertindak berdasarkan nilai keuntungan dan kerugian ekonomi, atau tindakan rasional instrumental. Akan lebih menguntungkan untuk mengurangi risiko pada saat tekanan ekonomi daripada semakin bergantung pada koperasi dan pabrik kelapa sawit. Kemampuan mengembangkan usahanya menunjukkan kemajuan pengelolaan perkebunan.

Di satu sisi, pengelolaan perkebunan rakyat telah membaik, namun di sisi lain, petani perkebunan semakin bergantung pada koperasi dan pabrik kelapa sawit/perkebunan nuklir di hampir setiap aspek pengelolaan perkebunan, termasuk transportasi, kecuali penggunaan tenaga kerja.

Hal ini menunjukkan bahwa petani semakin tidak mampu mengembangkan usahanya sendiri. Apakah usaha pribadi petani dapat menghasilkan lebih banyak uang dalam situasi ini? menjadi "buruh"?

### **Tatanan Kelembagaan Lokal dalam Perekonomian (Pelindung, KUD): Apakah Masih Ada Tuntutan Moral untuk Etika Subsisten?**

Dalam kasus perkebunan kelapa di wilayah Inhil, tauke—pemberi pinjaman dan pengepul—merupakan lembaga permodalan dan pemasaran tradisional yang bertahan lama. Koperasi dan usaha besar (pabrik kelapa/minyak goreng) adalah dua contoh lembaga modern yang muncul dan sering dikaitkan dengan tauke karena fungsinya untuk menggantikan posisi tauke.

Pabrik pengolahan kopra (PT Sambu) merupakan lembaga pemasaran besar yang menampung tauke. Keberadaan pabrik ini cenderung bersifat monopoli<sup>10</sup> dan berfungsi sebagai tauke (agen pemasaran sekaligus lembaga kredit) terbesar bagi para bos besar. Akibatnya keberadaan lembaga pemasaran ini juga berfungsi sebagai lembaga permodalan/perkreditan yang banyak dikunjungi petani dibandingkan dengan lembaga perbankan. Akibatnya selain dipengaruhi oleh kekuatan eksternal (pasar global), kopra pabrik pengolahan juga berperan penting dalam mempengaruhi perubahan harga kopra.

Koperasi<sup>12</sup>—lembaga baru yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan petani—masih relatif jarang ditemui. Namun, tampaknya lembaga koperasi ini tidak efisien, apalagi mampu bersaing dengan tauke. Ketidakmampuan mengakses 13 modal yang ada Kelembagaan adalah kendala utama. Demikian pula, persepsi petani tentang manfaat masih terbatas pada manfaat sosial — petani menjadi lebih terhubung secara sosial — tetapi mereka belum menerima manfaat ekonomi — yang mendukung ekonomi anggota.

Berdasarkan “kesepakatan” antara pemilik usaha dan petani, aturan main ditetapkan oleh tatanan kelembagaan ekonomi lokal. Petani, di sisi lain, tidak akan pernah bisa berpartisipasi dalam proses penetapan harga karena tidak ada transparansi. .

Dalam kebanyakan kasus, petani hanya menerima tauke atau harga PT.Sambu. Petani tidak pernah mengetahui harga resminya. Saat menjual kopra mereka, petani hanya belajar dari bos. walaupun harga kopra bervariasi dari desa ke desa. Penataan kelembagaan ekonomi lokal (patronage) telah menciptakan mekanisme yang memastikan bahwa tekanan ekonomi tidak membahayakan kemampuan petani untuk bertahan hidup. Petani hanya bisa mendengar dan mengeluh tentang perbedaan harga ini. Risiko ekonomi petani dibagi di antara tauke, yang menyediakan asuransi sosial. Meskipun petani harus membayar banyak uang untuk tauke ini, yang terpenting adalah kekurangan mereka. kebutuhan jangka terpenuhi.

Namun, ketika peluang ekonomi baru muncul, mekanisme ini tidak mampu meningkatkan kesejahteraan petani atau memberikan peluang mobilitas sosial. Hubungan seperti ini pada akhirnya merugikan petani. Oleh karena itu, rasa ketidakadilan dimaknai bukan sebagai gangguan pada petani. ' cadangan subsisten melainkan sebagai kurangnya akses bagi petani untuk meningkatkan status atau kesejahteraan mereka melalui penguasaan aset/modal. Petani tidak mau lagi terlibat dalam proses jual beli (misalnya mengawasi proses penimbangan, penentuan harga, dll).<sup>16</sup> Upaya petani untuk melepaskan diri dari atasannya merupakan indikator yang jelas. berlangsung, petani akan disebut sebagai "liar"<sup>17</sup> (lampiran 3). Dalam kasus PIR-Trans Palm Oil di wilayah Kampar, lembaga yang masih beroperasi untuk memperoleh fasilitas produksi dan pemasaran untuk usaha perkebunan kelapa sawit adalah KUD. Lembaga-lembaga ini dapat dianggap kontemporer.

Keberadaan petani yang membeli buah dari pekarangannya diperlukan karena ingin membeli dan memasarkan buah kelapa sawit, meskipun dalam jumlah sedikit. Selain KUD, muncul gejala pembeli (tauke) sawit dari pekarangan mereka.<sup>19</sup> Selain itu, tauke berfungsi sebagai lembaga permodalan yang meminjamkan uang kepada petani secara sukarela dan langsung.

Pabrik kelapa sawit yang dimiliki oleh perusahaan inti dan berfungsi sebagai tauke (badan pemasaran dan pengadaan sarana produksi) terbesar bagi petani plasma, merupakan lembaga pemasaran yang lebih besar sebagai wadah, baik dari KUD maupun tauke.<sup>20</sup> Akibatnya, konglomerat

pabrik sebagai pemegang kendali utama ditengarai “memainkan” perubahan harga kopra selain ditentukan oleh kekuatan eksternal (pasar global).

Dari segi organisasi petani, lembaga atau organisasi yang muncul adalah kelompok kerja (*participatory group*) yang terbentuk atas kesadaran warga. Perluasan kelompok dalam kasus PIR-Trans kelapa sawit di desa Tapung Makmur menyebabkan terbentuknya berdasarkan pekerjaan atau ikatan profesi seperti dalam kasus kelompok Tunas Harapan.<sup>22</sup> Pembentukan kelompok telah diamanatkan dengan maksud untuk mencapai tujuan kesejahteraan bersama.

Untuk tujuan peningkatan produktivitas petani, terlihat bahwa keberadaan lembaga atau organisasi ini lebih efektif. Paling tidak, nilai-nilai kelompok kerja profesional dan teknik manajemen konflik dalam kelompok merupakan potensi sosial yang dapat dikembangkan.

Meskipun KUD sudah ada, namun belum mampu membantu petani meningkatkan permodalan. Ketidakmampuan petani dan KUD untuk mendapatkan akses ke lembaga permodalan yang ada menjadi kendala utama. Akibatnya, petani belum mengalami sosial dan manfaat ekonomi dari lembaga yang ada (yang berkontribusi pada peningkatan ekonomi anggota).

Berdasarkan “kesepakatan” antara petani, KUD, pengusaha, dan pemerintah, tatanan ekonomi perkebunan kelapa sawit menetapkan aturan main. Namun, petani tidak pernah bisa melakukan proses penentuan harga. Kurangnya transparansi dalam pola mata pencaharian untuk bertahan hidup kerangka kerja untuk akumulasi modal (tenaga kerja hutan, pertanian, dan kebun) Penguatan jaringan dan hubungan tauke patron- kelembagaan klien partisipatif dengan tauke melalui investasi pembangunan dan penguatan; mencari patron, kelompok tani baru, dan mitra kontrak (pemberi kerja). Berbagai lapisan strategi adaptasi petani (strategi mata pencaharian ganda dan pengembangan jaringan) adalah tindakan yang tepat untuk mengatasi kemiskinan sesuai dengan lingkungan budaya, sosial, politik, ekonomi, dan ekologi mereka. Strategi yang diterapkan didasarkan pada kepentingan ekonomi dan sosial, secara khusus menciptakan peluang usaha dan mengurangi risiko usaha. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas masyarakat atau masyarakat lokal dan dukungan terhadap program penanggulangan kemiskinan yang diarahkan pada pengembangan program yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat miskin itu sendiri diperlukan untuk mendukung strategi yang digunakan dalam upaya pengurangan kemiskinan di tingkat rumah tangga petani.

Ekonomi masyarakat dapat sedikit ditingkatkan dengan mengelola perkebunan rakyat. Namun, situasinya agak membaik dalam tiga tahun sejak krisis karena turun atau turunnya harga komoditas perkebunan (kelapa dan kelapa sawit). Petani menjadi miskin akibat dinamika pengelolaan perkebunan rakyat, yang membuat mereka tidak berdaya dan bergantung pada kekuatan luar (monopoli pabrik kelapa sawit).

Tatanan kelembagaan ekonomi lokal telah berubah sebagai akibat interaksi antara lembaga intervensi pasar (patronage dan KUD) dengan lembaga ekonomi lokal (patronage dan KUD). Etika subsistensi masih merupakan persyaratan moral, tetapi petani tidak memiliki kesempatan untuk meningkatkan kesejahteraan mereka. Kesenjangan antar lapisan telah tumbuh bahkan ketika mekanisme kelembagaan pasar berfungsi selama krisis ekonomi.

## KESIMPULAN

Kelembagaan ekonomi lokal belum cukup untuk meningkatkan kesejahteraan petani dan memberdayakan mereka, juga belum mampu mengelola perkebunan rakyat secara berkelanjutan. Untuk memberdayakan petani kelapa, upaya penguatan kelembagaan ekonomi lokal harus mendefinisikan ulang atau menciptakan etika subsisten. nilai sebagai jaminan kesejahteraan bagi petani dengan memberi mereka akses ke kontrol aset/modal. Keamanan investasi jangka panjang perlu mendorong tindakan ekonomi ini.

Tindakan yang meningkatkan kemampuan, mengurangi risiko, dan menciptakan peluang usaha/kerja adalah contoh dari dimensi kepentingan ekonomi dan sosial. mendasari cara petani dari semua tingkatan bertindak dalam upaya untuk keluar dari kemiskinan dan meningkatkan taraf hidup mereka. Petani kaya menerapkan strategi gaya hidup ganda rumah tangga dengan mengembangkan berbagai mata pencaharian berbasis tenaga kerja dalam konteks akumulasi modal dan pengembangan partisipasi kelembagaan, sementara petani miskin biasanya bertahan. Kondisi sosial budaya, struktur sosial, dan sumber daya masyarakat petani tercermin dalam strategi ini.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Burns, T. R., Baumgartner, T., & Devilie, P. (1987). *Manusia, keputusan, masyarakat: Teori dinamika antara aktor dan sistem untuk ilmu sosial*. Jakarta: PT Pradnya Paramita.
- Etzioni, A. (1992). *Dimensi moral: Menuju ilmu ekonomi baru*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Granovetter, M., & Swedberg, R. (1992). *The sociology of economic life*. Boulder, CO: Westview Press.
- Quibria, M. G. (1996). *Rural poverty in developing Asia*. Manila: Asian Development Bank.
- Swedberg, R. (1998). *Max Weber and the idea of economic sociology*. Princeton, NJ: Princeton University Press.
- Swedberg, R. (2003). *Principles of economic sociology*. Princeton, NJ: Princeton University Press.
- Scott, J. C. (1989). *Moral ekonomi petani: Pergolakan dan subsistensi di Asia Tenggara*. Jakarta: LP3ES.
- Sumarti, T., & Irawan, R. (2000). *Laporan sosiologi studi produksi perkebunan rakyat dan penanggulangan kemiskinan: Provinsi Riau*. Pusat Penelitian dan Pengembangan Perkebunan bekerja sama dengan World Bank. (Tidak diterbitkan).
- Uphoff, N. T. (1986). *Local institutional development: An analytical source book with cases*. West Hartford, CT: Kumarian Press.